

ANALISA PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID MENGENAI WACANA PEMBUKAAN HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA - ISRAEL

Fariz Ramaditya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
fariz.ramaditya@gmail.com

ABSTRAK

Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Gus Dur adalah Presiden Republik Indonesia ke-4. Pada masa pemerintahan Gus Dur, beliau beberapa kali menyatakan keinginannya untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Pada masa pemerintahan Soekarno dan Suharto, wacana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel tidak pernah dinyatakan secara terbuka oleh keduanya. Bahkan Soekarno pernah mengeluarkan kebijakan anti Israel. Makalah ini akan membahas tentang wacana Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia - Israel, dengan metode analisa individual. Fokus pembahasan lebih ditekankan pada citra dan sistem nilai kepercayaan atau persepsi Gus Dur terhadap Israel. Di mana persepsi memiliki pengaruh terhadap tindakan dan pemikiran beliau. Citra dan sistem nilai kepercayaan Gus Dur dapat ditemukan dengan menganalisa biografi, tulisan-tulisan dan pernyataan dari orang-orang terdekat Gus Dur. Dari penelitian yang telah penulis lakukan, Gus Dur memiliki beberapa citra dan sistem nilai kepercayaan, di antaranya adalah sifat moderat dan pragmatis, beserta nilai-nilai Islam dan Pancasila. Citra dan sistem nilai kepercayaan atau persepsi tersebut, telah mempengaruhi Gus Dur untuk bertekad membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dengan membuka hubungan diplomatik Indonesia - Israel, Gus Dur berharap Indonesia mampu mendapatkan keuntungan atau manfaat dari hubungan kedua negara tersebut. Selain itu terlihat bahwa Gus Dur menginginkan Indonesia untuk menjadi juru damai di Timur Tengah terutama terhadap konflik Palestina - Israel.

Kata Kunci: wacana; diplomatik; Israel; konflik; nilai

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik adalah hubungan legal yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya, dengan tujuan agar masing-masing dari negara tersebut mendapatkan manfaat sebesar besarnya. Untuk membuka hubungan diplomatik, sebuah negara terlebih dahulu harus mengakui negara yang dituju sebagai negara yang berdaulat. Tentunya sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebelum membangun hubungan diplomatik, Indonesia telah mengakui negara tersebut sebagai negara yang berdaulat dan sebaliknya. Walaupun tidak dapat dipungkiri ada negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia karena Indonesia belum mengakui negara tersebut sebagai sebuah negara yang berdaulat seperti negara Israel.

Sejak tahun 1948, ketika Israel resmi berdiri, Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Pada masa pemerintahan Soekarno, Indonesia sangat menentang keberadaan Israel di Timur Tengah dan pernah mengeluarkan kebijakan anti terhadap Israel. Penentangan Soekarno terhadap eksistensi negara Israel, bukan karena beliau beragama Islam, akan tetapi lebih ditekankan kepada faktor penjajahan Israel terhadap masyarakat Palestina. Selain itu, penolakan Soekarno terhadap eksistensi Israel di Timur Tengah sebagai bentuk kedekatan Indonesia dengan negara-negara Arab seperti Mesir yang anti terhadap Israel pada saat itu.

Konsistensi Soekarno yang anti terhadap Israel terlihat pada Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Pada saat itu bersama dengan Pakistan, Indonesia menolak partisipasi Israel yang ingin bergabung di dalam KAA (Mukthi M. F.). Bahkan pada perhelatan *Asian Games* di Jakarta pada tahun 1964, Soekarno juga menolak keberadaan delegasi Israel yang ingin berpartisipasi pada perhelatan tersebut (Sulaeman, 2014).

Pada masa pemerintahan Suharto, kebijakan luar negeri Indonesia terlihat lebih moderat dan pragmatis terhadap Israel. Pemerintahan Suharto terlihat sama seperti Soekarno yang mendukung negara-negara Arab yang anti terhadap Israel. Selain itu, pemerintahan Suharto juga sering mengkritik Israel di dalam forum Internasional. Faktanya ketika Raja Arab Saudi, Raja Faisal berkunjung ke Jakarta pada tahun 1970, Suharto menegaskan dukungannya kepada perlawanan negara Arab terhadap Israel (Sumandoyo, 2015). Selain itu, pada tahun 1982, pemerintahan Suharto juga sempat mengecam agresi militer Israel ke Libanon dan Dataran Tinggi Golan (Rubenstein, 2005). Walaupun demikian, pada masa Suharto, Indonesia sempat melakukan hubungan dagang dengan Israel melalui Amerika Serikat pada tahun 1979. Pada saat itu Indonesia membeli dua puluh delapan pesawat *Skyhawk* dan sebelas helikopter Israel (Sumandoyo, 2015). Bahkan pada tahun 1995, Suharto sempat bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin di New York yang dilakukan secara tertutup. Keduanya sepakat atas normalisasi hubungan kedua negara kepada tahap hubungan dagang sebelum membangun hubungan diplomatik (Rubenstein, 2005). Sehingga dapat dikatakan pada masa Suharto, Indonesia tidak pernah mengakui kedaulatan Israel akan tetapi adanya beberapa hubungan luar negeri secara informal yang dilakukan oleh kedua negara.

Pada 20 Oktober 1999, Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur, resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-4 menggantikan B.J. Habibie. Bertepatan empat hari setelah dilantik sebagai Presiden RI, Gus Dur menghadiri seminar *Indonesia Next* di Denpasar, Bali. Beliau pada saat itu menyatakan gagasannya untuk membuka hubungan dagang dengan Israel sebelum membuka hubungan diplomatik (Jatmika, 2001:163). Gagasan ini dibenarkan oleh menteri luar negeri Republik Indonesia pada saat itu, Alwi Shihab. Wacana ini banyak menimbulkan penolakan dan kecaman dari organisasi masyarakat Islam dan juga dari beberapa partai politik Islam. Sehingga Alwi Shihab selaku Menteri Luar Negeri dimintai keterangannya oleh Komisi I DPR RI. Pada saat itu Komisi I DPR meminta agar pemerintah meninjau kembali gagasan atau wacana tersebut. (Suhartono, 2001: 166)

Dari perjalanan sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, belum ada pemimpin negara yang menunjukkan keinginannya dan menyatakan secara terbuka untuk

membuka hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel kecuali Gus Dur. Faktanya pemerintahan Soekarno sangat anti terhadap Israel. Sedangkan pemerintahan Suharto sedikit terbuka terhadap Israel, tetapi Suharto tidak pernah menyatakan pernyataan secara terbuka untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : Mengapa Presiden Abdurrahman Wahid menginginkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel?

Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan dari wacana pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia - Israel.
2. Sebagai acuan pemerintah Indonesia dalam menentukan dan menjalankan kebijakan luar negeri di dunia internasional, khususnya terhadap Israel.

Kajian Pustaka

Studi tentang gagasan atau wacana Gus Dur berkaitan dengan pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia - Israel telah dilakukan oleh Suhartono. Suhartono menunjukkan bahwa gagasan Gus Dur tersebut terutama membuka hubungan dagang dengan Israel merupakan dari realisasi kepentingan nasional Indonesia pada saat itu yang mengedepankan unsur ekonomi. Selain itu, Suhartono juga berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Gus Dur telah mengabsenkan nilai-nilai Islam. Keluarnya gagasan untuk membangun hubungan resmi dengan Israel sebagai bentuk pragmatis Gus Dur. Suhartono juga berpendapat bahwa tindakan dan gagasan Gus Dur tersebut, merupakan upaya beliau yang menginginkan Indonesia untuk menjadi juru damai di Timur Tengah, khususnya konflik antara Palestina dan Israel (Suhartono, 2001:189-190).

Studi Suhartono yang menyatakan kebijakan luar negeri Gus Dur telah mengabsenkan nilai-nilai Islam juga diperkuat oleh Rizal Sukma. Rizal Sukma berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Gus Dur telah mengabsenkan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam hanya terdapat secara substansial dalam hal kepentingan politik domestik, bukan kepada kepentingan *ummah* secara umum. Rizal Sukma juga sependapat dengan Suhartono dalam hal pengedepanan hubungan luar negeri Gus Dur di Timur Tengah, sebagai bentuk kepentingan nasional seperti kepentingan ekonomi. Selain itu, Sukma menambahkan bahwa kebijakan luar negeri Gus Dur di Timur Tengah juga menekankan kepentingan nasional Indonesia lainnya, yaitu menekankan pentingnya penegakan integritas wilayah Indonesia, mengembalikan martabat negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memperbaiki kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia (Sukma, 2003:101).

Rizal Sukma juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Gus Dur kurang lebih sama dengan pemerintahan sebelumnya, yang cenderung pragmatis. Hal yang

membedakan kebijakan luar negeri Gus Dur dengan pemerintahan sebelumnya adalah penekanan prinsip *the policy of equidistance* (kebijakan berjarak sama) dan *balancing act* (pengimbangan) oleh Gus Dur (Sukma, 2003:103). Dari aspek kunci ini, Gus Dur menginginkan seluruh negara sebagai kawan bagi Indonesia. Indonesia harus memiliki jarak dan memperlakukan semua negara secara berimbang. Hal ini yang membuat manifestasi kebijakan luar negeri Gus Dur berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya.

Di dalam buku *Islam in Indonesia Foreign Policy*, Rizal Sukma juga mengutip pendapat dari Alwi Shihab yang merupakan Menlu RI pada masa pemerintahan Gus Dur. Shihab berpendapat bahwa pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel, dapat memberikan keuntungan dan manfaat kepada Indonesia yang keseluruhannya dapat diperoleh dari kekuatan lobi Yahudi Internasional. Seperti lobi Yahudi di UNHCHR mampu mencegah pengadilan Internasional terhadap beberapa Jenderal TNI yang terkena kasus hak asasi manusia di Timor Timur. Selain itu menurut Shihab, lobi Yahudi dapat menarik investor asing untuk berinvestasi ke Indonesia dan peran tokoh Yahudi internasional seperti George Soros mampu membuat krisis di Indonesia. Dalam hal konflik Israel - Palestina, Shihab berpendapat bahwa hubungan diplomatik Indonesia - Israel dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran penting atas konflik tersebut. Sehingga menurut Shihab pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel sangat perlu dilakukan (Sukma, 2003:112-113).

Bertentangan dengan Alwi Shihab, Sidik Jatmika berpendapat bahwa hubungan diplomatik antara Indonesia - Israel tidak seharusnya terjadi karena beberapa faktor penting. *Pertama*, hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dapat melanggar UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang anti penjajahan. *Kedua*, Hubungan tersebut dapat merusak citra Indonesia di hadapan dunia Islam dan masyarakat dunia yang cinta damai. *Ketiga*, Hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel dapat merusak posisi tawar perjuangan rakyat Palestina di muka Israel. *Keempat*, Hubungan dagang Indonesia dengan Israel hanya akan membuat defisit neraca perdagangan Indonesia. *Kelima*, hubungan tersebut dapat mengancam stabilitas politik domestik Indonesia (Jatmika, 2001:180-181).

KERANGKA TEORITIK

Pada penelitian ini, penulis menggunakan salah satu variabel dari beberapa variabel pembentukan kebijakan luar negeri yang diutarakan oleh James N. Rosenau. Variabel tersebut adalah variabel Ideosinkretik atau individual. Variabel ini kemudian penulis gunakan sebagai acuan dasar penelitian ini. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep mediasi untuk menjelaskan tujuan dari Gus Dur yang menginginkan Indonesia memiliki hubungan dengan Israel.

I. Variabel Ideosinkretik

Di dalam penentuan kebijakan luar negeri, setidaknya ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Menurut James N. Rosenau, faktor-faktor tersebut adalah ideosinkretik, peranan, birokratis, nasional, dan sistemik. Variabel ideosinkretik atau

individual adalah sebuah variabel yang berhubungan dengan pandangan, persepsi, dan karakteristik pribadi seorang pembuat keputusan seperti pemimpin negara. Menurut Theodore A. Coulumbis karakter psikologis dan kegemaran seorang pembuat keputusan terhadap sebuah ideologi tidak dapat dipungkiri memiliki pengaruh terhadap sebuah kebijakan politik. Walaupun karakteristik dari seseorang pengambil keputusan tersebut sangat sulit untuk diukur. Selain itu menurut Coulumbis, keputusan-keputusan politik yang dihasilkan dari variabel ideosinkretik terlihat memiliki kecenderungan kepada hasil yang bersifat pragmatis. Coulumbis juga menambahkan bahwa analisa variabel ideosinkretik akan lebih mudah dianalisa pada keputusan-keputusan di negara totaliter dan otoriter dibandingkan di negara demokratis. Hal ini terjadi karena pemimpin di negara demokratis memiliki kecenderungan untuk tunduk kepada beberapa faktor yang ada di negara demokratis seperti kebebasan pers, parlemen, opini publik, kelompok-kelompok, organisasi masyarakat dan lain-lain (Coulumbis, 1999:129-130).

Analisa individual atau ideosinkretik menurut Mohtar Mas'ood, juga disebut sebagai teori persepsi atau citra. Citra yang dimiliki setiap individu berbeda-beda karena citra itu sendiri bersifat dinamik yang dapat berubah-ubah kapan saja tergantung bagaimana dan apa yang diketahui seseorang tentang sesuatu yang mendorong mereka untuk mengeluarkan tindakan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa segala tindakan seorang individu tergantung bagaimana seseorang memandang objek tersebut (Mas'ood, 1989:19-20).

Mengingat penelitian ini hanya sebatas penelitian terhadap wacana atau gagasan yang dikeluarkan oleh presiden Abdurrahman Wahid belum sampai kepada tahapan sebuah kebijakan luar negeri, maka penulis lebih memfokuskan penelitian ini kepada analisa variabel ideosinkretik yang dipaparkan oleh James N. Rosenau. Walaupun Indonesia pada saat itu berupaya untuk menjadi sebuah negara demokratis pasca rezim orde baru, gagasan Gus Dur mengenai upaya pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel dapat dikatakan sebagai gagasan pragmatis Gus Dur. Hal ini dikarenakan gagasan tersebut telah mengabaikan beberapa faktor demokratis seperti opini publik, kelompok-kelompok organisasi masyarakat, dan parlemen yang tidak menghendaki Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Sehingga menurut penulis gagasan Gus Dur ini dapat dianalisa dengan analisa ideosinkretik.

2. Konsep Mediasi

Mediasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dihadapi oleh dua pihak yang bersengketa. Mediasi berasal dari kata *mediation* yang berarti penengahan. Di dalam sebuah mediasi dibutuhkan pihak ketiga sebagai penengah yang berusaha menengahi permasalahan dalam persengketaan (Sutiyoso, 2008:56-57).

Christopher W. Moore menyatakan bahwa pihak ketiga atau mediator di dalam mediasi memiliki posisi sebagai pihak yang berupaya mengintervensi sebuah sengketa yang bisa diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediator bukan berasal dari pihak yang bersengketa. Hal wajib yang harus ada pada pihak mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah netralitasnya dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Selain itu, di dalam mediasi, mediator tidak memiliki hak untuk mengambil

keputusan, mediator hanya memiliki kewajiban untuk mendorong para pihak secara sukarela mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa (Sutiyoso, 2008:57). Bambang Sutiyoso, dalam buku *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, menyatakan sebagai berikut:

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa (Sutiyoso, 2008:58).

Dalam kasus keluarnya gagasan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia - Israel, sesungguhnya Gus Dur ingin memiliki posisi yang netral di dalam sengketa Palestina-Israel agar mampu menjadi mediator di antara kedua belah pihak. Keinginan Gus Dur ini diperkuat dengan adanya *the policy of equidistance* dan *balancing act* di dalam kebijakan luar negeri Gus Dur yang diungkapkan oleh Rizal Sukma, di mana Gus Dur menginginkan jarak yang sama dan upaya pengimbangan di dalam kebijakan luar negerinya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif eksplanatif atau *mix method*. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta latar belakang dan pengalaman-pengalaman Gus Dur selama hidupnya sebelum dan selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia pada tahun 1999-2001. Dengan mengetahui latar belakang Gus Dur tersebut, penulis akan menemukan sistem nilai, kepercayaan dan citra atau persepsi Gus Dur. Kemudian dengan metode eksplanatif penulis akan menjelaskan mengapa Gus Dur menginginkan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Sedangkan, Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode telaah pustaka (*library research*). Metode telaah pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari literatur seperti buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, surat kabar, dan situs-situs internet tepercaya ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

PEMBAHASAN

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur memiliki sifat moderat dan pragmatis. Moderat adalah sifat dari seseorang yang selalu menghindari dari perilaku dan pengungkapan yang ekstrem atau dapat dikatakan sifat kecenderungan seseorang untuk mengambil jalan tengah. Sedangkan pragmatis adalah sifat dari seseorang yang memiliki kecenderungan kepada sebuah kepraktisan dan mengutamakan kemanfaatan yang banyak atau bermanfaat bagi khalayak umum. Berdasarkan analisa penulis sesungguhnya Gus Dur memiliki karakter tersebut di dalam mengeluarkan gagasan dan tindakannya.

I. Keterkaitan Sifat Moderat dan Pragmatis Gus Dur di dalam Wacana Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia - Israel

Sepanjang sejarah berdirinya Israel, banyak didapati bahwa Israel mengalami konflik yang berkepanjangan dengan negara Arab seperti Mesir, Suriah, Libanon dan Yordania. Negara Arab dengan Israel telah terlibat dalam beberapa perang seperti perang kemerdekaan 1948, Krisis Suez, Perang Enam Hari, dan Perang Yom Kippur. Di dalam perang-perang tersebut, banyak memakan korban jiwa dari masing-masing pihak. Walaupun Mesir, pada masa kepemimpinan Anwar Sadat akhirnya menandatangani perjanjian damai dengan Israel yang dikenal dengan perjanjian Camp David (Goldschmidt, 1988), Akan tetapi masih ada beberapa negara Timur Tengah yang masih menolak eksistensi Israel di kawasan tersebut.

Pada masa pemerintahan Soekarno, terlihat bahwa Indonesia sangat anti terhadap Israel. Hal ini dikarenakan adanya kedekatan Indonesia dengan negara-negara Arab. Negara Arab seperti Mesir adalah negara yang mengakui Indonesia pertama kali sebagai negara berdaulat. Di mana Mesir juga sangat anti terhadap Israel. Selain itu, Soekarno juga menganggap bahwa Israel telah merampas tanah masyarakat Palestina, sehingga semakin memperdalam sikap anti Soekarno terhadap Israel. Sedangkan pada masa Suharto, Indonesia sedikit lebih terbuka terhadap Israel. Keterbukaan Suharto terhadap Israel merupakan faktor kedekatan Indonesia dengan Amerika Serikat dan beberapa keuntungan dari hubungan Indonesia - Israel dari segi pembelian perlengkapan militer.

Gus Dur yang memiliki sifat moderat, terlihat lebih memilih untuk bekerja sama dengan Israel dibandingkan berkonflik dengan Israel. Hal ini tidak hanya ditunjukkan oleh Gus Dur kepada Israel, tetapi hal ini juga diperlihatkan oleh Gus Dur ke seluruh negara di dunia. Gus Dur menginginkan Indonesia bisa bersahabat dengan semua negara tanpa memandang agama, budaya bahkan etnis negara tersebut. Bagi Gus Dur ketika Indonesia memiliki satu lawan, maka Indonesia memiliki masalah besar. Sama halnya di dalam kancah domestik, Gus Dur selalu membela kaum-kaum minoritas di dalam negeri tanpa terkecuali.

Dari sifat pragmatis Gus Dur, beliau menginginkan Indonesia untuk mampu mendapatkan manfaat yang banyak dari hubungan luar negeri dengan Israel. Tidak hanya Indonesia, Gus Dur berharap hubungan Indonesia dengan Israel juga dapat menguntungkan kedua belah pihak secara adil.

Kemanfaatan yang diharapkan Gus Dur telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada era Gus Dur, Alwi Shihab. Pernyataan Alwi Shihab ini dikutip oleh Rizal Sukma di dalam buku *Islam in Indonesia Foreign Policy* (Sukma, 2003:112-113);

- a. Alwi Shihab berpendapat bahwa hubungan Indonesia secara langsung dengan Israel mampu memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memainkan peran penting untuk mencari solusi perdamaian antara Palestina - Israel.
- b. Shihab juga berpendapat bahwa hubungan yang baik dengan Israel mampu menarik lobi Yahudi untuk berinvestasi di Indonesia, mengingat mayoritas penguasa ekonomi dunia berasal dari keturunan Yahudi Internasional.

- c. Perencanaan hubungan yang baik dengan Israel merupakan argumen agama, mengingat pada masa nabi Muhammad SAW, Muhammad juga pernah menjalin hubungan perdagangan yang baik dengan kaum Yahudi walaupun pada akhirnya kaum Yahudi melontarkan konspirasi menentang Muhammad.
- d. Alwi Shihab berpendapat hubungan yang baik dengan Israel mampu mencegah pengadilan Internasional terhadap beberapa Jenderal TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang terkena kasus hak asasi manusia di Timor Timur.
- e. Argumen Shihab yang terakhir adalah hubungan dagang dengan Israel mampu mencegah Indonesia dari krisis ekonomi. Shihab berpendapat bahwa salah satu tokoh ekonomi Yahudi internasional, George Soros mampu menghasut atau menciptakan krisis di dalam ekonomi Indonesia. Sehingga dengan adanya hubungan dagang yang baik dengan Israel, pemerintah bisa melobi George Soros untuk tidak mengacau ekonomi Indonesia.

Dari argumen-argumen Alwi Shihab selaku Menlu RI pada masa Gus Dur, terlihat wacana Gus Dur ini memiliki segi kemanfaatan yang banyak bagi Indonesia. Di mana memang seharusnya terlihat demikian karena Gus Dur bersifat moderat dan pragmatis yang selalu mencari jalan tengah dan memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan atau kemanfaatan bagi masyarakat luas dari setiap tindakannya.

2. Keterkaitan Prinsip Nilai Islam dan Pancasila Gus Dur di dalam Wacana Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia -Israel

Selain memiliki citra yang moderat dan pragmatis, Gus Dur memiliki sebuah prinsip nilai Islam yang sangat mendasar yaitu konsep Islam sebagai agama *rahmattan lil'alam*. Muahimin Iskandar di dalam bukunya yang berjudul *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia* mengungkapkan bahwa Gus Dur yang tumbuh besar di lingkungan pesantren sesungguhnya memiliki nilai-nilai Islam dan nilai-nilai pesantren di dalam setiap tindakan dan perbuatannya (Iskandar, 2007:12).

Selain prinsip *rahmattan lil'alam*, Gus Dur juga memegang teguh ideologi Pancasila. Pancasila dan Islam sesungguhnya memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Ideologi Pancasila sangat berarti bagi masyarakat Indonesia, mengingat kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemikiran tentang keterkaitan Islam dan Pancasila telah dikaji oleh Gus Dur, ketika Presiden Suharto meminta agar seluruh organisasi kemasyarakatan di Indonesia menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Gus Dur yang pada saat itu merupakan salah satu anggota Dewan Syariah NU (Nahdhatul Ulama) dimintai untuk mengkaji Pancasila dan keterkaitannya dengan Islam dan tradisi pesantren (Barton, 2001:160-161).

Menurut penulis, citra dan sistem nilai dari Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam dan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh Gus Dur turun dalam bingkai perjuangan kemanusiaan. Sehingga mampu mempengaruhi tekad beliau untuk membuka hubungan diplomatik antara Indonesia - Israel. Dengan alasan rahmat bagi seluruh alam dan prinsip-prinsip Pancasila seperti *ketuhanan yang maha esa* dan *kemanusiaan yang adil dan beradab*, beliau harus berlaku adil dengan Israel, terutama masyarakat Yahudi yang tinggal di dalamnya.

Dengan nilai-nilai ini terlihat Gus Dur menganggap bahwa Israel yang dihuni oleh jutaan Yahudi juga seorang manusia sama seperti muslim dan kristen lainnya. Masyarakat Yahudi di Israel juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Meninggalkan hak-hak Yahudi dan membela dari salah satu pihak tentunya tidak adil bagi Gus Dur. Apalagi beliau sangat mengetahui bahwa bangsa Yahudi sejak lama mengalami diaspora ke berbagai penjuru dunia dan mengalami perbudakan ketika bangsa Babylonia dan Romawi menyerang ke wilayah Kan'an.

Penderitaan bangsa Yahudi tidak berhenti ketika penyerangan bangsa Babylonia dan Romawi. Penyebaran Yahudi ke Eropa juga telah banyak mengakibatkan diskriminasi terhadap orang-orang Yahudi di Eropa yang dikenal dengan antisemitisme, seperti apa yang pernah terjadi di Jerman dan Rusia. Diskriminasi besar-besaran yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi membuat para pemikir Yahudi seperti Moses Hess dan Leo Pinsker hingga kepada Theodor Herzl menyatakan bahwa Yahudi tertindas karena tidak memiliki tanah sendiri. Hal ini yang kemudian mendasari dibentuknya gerakan zionisme yang berupaya mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah Kan'an (Goldschmidt, 1988). Pembelaan terhadap bangsa Yahudi yang tertindas dan Israel tentunya berasaskan nilai-nilai Pancasila dan Islam yang berbingkai perjuangan atas nama kemanusiaan sebagai bentuk Islam *rahmatan lil'alam*.

Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat Palestina? Apakah Gus Dur melupakan masyarakat Palestina yang haknya dirampas oleh orang-orang Yahudi? Seharusnya dengan nilai Pancasila dan Islam *rahmatan lil'alam*, Gus Dur juga harus memperhatikan masyarakat Palestina? Menurut Gus Dur, justru dengan melakukan hubungan diplomatik dengan Israel, Indonesia bisa terlibat langsung dalam membantu masyarakat Palestina. Tanpa ada hubungan diplomatik dengan Israel dan perubahan sudut pandang Israel terhadap Palestina maka kondisi Palestina akan tetap dalam keadaan seperti itu. Dengan pendirian Gus Dur yang menjunjung tinggi Pancasila dan Islam yang diawali dengan hubungan diplomatik Indonesia dengan Israel, Indonesia bisa menghargai hak-hak Israel sekaligus mendorong Israel untuk menciptakan perdamaian di Palestina, tanpa harus memihak pada salah satu pihak. Dari hal ini terlihat Gus Dur menginginkan dimensi baru di dalam negosiasi penyelesaian konflik Palestina - Israel.

Gus Dur sesungguhnya menginginkan Indonesia untuk menjadi juru damai di Timur Tengah terutama antara Palestina - Israel. Untuk menciptakan perdamaian dari kelompok yang berkonflik, pihak ketiga tidak bisa serta merta menyelesaikan permasalahan tanpa diakui oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Hal ini sesuai dengan konsep mediasi seperti yang diungkapkan oleh Christopher W. Moore di dalam buku *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* karangan Bambang Sutiyoso; "*Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral.*" (Sutiyoso, 2008:56-57)

Pihak ketiga atau mediator yang ingin menjadi juru damai dari sebuah konflik, tidak bisa secara langsung melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang berkonflik. Mediator tersebut harus bisa bersifat netral dan mengakui kedua belah pihak secara adil, sehingga kedua belah pihak tersebut mau melakukan mediasi yang dilakukan mediator. Keinginan Gus Dur sebagai rahmat bagi Timur Tengah terutama

terhadap masyarakat Palestina ini harus melalui tahap pengakuan Indonesia terhadap Israel dan tidak membedakan kalangan yang satu dengan yang lainnya. Di mana Islam *rahmattan lil'alam* dan sila ke-2 *kemanusiaan yang adil dan beradab* tidak memandang agama, bahwa semua manusia itu sama.

KESIMPULAN

Sifat moderat dan pragmatis Gus Dur telah membuat beliau memiliki kecenderungan untuk selalu mengambil jalan tengah dan berupaya untuk mengambil sisi kepraktisan yang dianggap memiliki segi kemanfaatan yang banyak bagi Indonesia. Bagi Gus Dur, memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dapat memberikan keuntungan yang banyak bagi Indonesia dan juga Israel dibandingkan dari kerugiannya.

Selain itu nilai-nilai Islam dan Pancasila juga dapat dikatakan sebagai alasan Gus Dur atas isu ini. Gus Dur adalah seseorang yang berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Islam pada setiap gagasan dan tindakannya. Walaupun Gus Dur seorang Islamis sejati, beliau juga dapat dikatakan sebagai Pancasilais atau seseorang yang menganut ideologi Pancasila yang baik dan setia.

Secara lebih spesifik, nilai Islam yang membuat Gus Dur mengeluarkan gagasan ini adalah kepercayaan bahwa Islam adalah agama *rahmattan lil'alam* atau Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam tanpa memandang suku, budaya, bangsa bahkan agama, di mana prinsip nilai ini selalu dipegang teguh oleh Gus Dur. Islam sebagai agama rahmat harus mampu berlaku adil dan bijak kepada siapa pun termasuk dalam isu antara Palestina dan Israel. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam tidak seharusnya berpihak kepada salah satu pihak semata apalagi Gus Dur sangat mengenal bangsa Yahudi yang selalu tertindas oleh masyarakat di mana mereka pernah tinggal sebelum berdirinya negara Yahudi Israel.

Sedangkan nilai Pancasila yang memiliki keterkaitan terhadap isu ini adalah sila ke-2 yaitu *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Nilai sila ke-2 dari Pancasila sesungguhnya memiliki keterkaitan dengan Islam *rahmattan lil'alam* yang membentuk persepsi yang sama terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang beradab.

Selain itu, dengan nilai Islam dan Pancasila tersebut, terlihat bahwa Gus Dur menginginkan Indonesia keluar sebagai juru damai Timur Tengah terutama bagi Palestina dan Israel. Walaupun hubungan diplomatik ini terlihat keberpihakan Gus Dur dengan Israel, sesungguhnya hubungan ini sebagai tahap awal dari upaya Gus Dur terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dengan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, Gus Dur berharap Indonesia mampu melobi Israel dan menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik antara Israel dengan Palestina agar kata damai dapat terwujud dan hak-hak rakyat Palestina dapat terpenuhi. Mengingat ketika pihak ketiga seperti Indonesia menginginkan menjadi mediator sebuah konflik, Indonesia harus bersifat netral dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Pihak ketiga tersebut harus bersifat objektif dan adil bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Barton, G. (2001). *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS.
- Coulumbis, Theodore A. & James H. Wolfe (1999). *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Hal 129-130. Bandung: Putra A Bardin
- Goldschmidt, Arthur. (1988). *A Concise History of the Middle East*. Colorado: Westview Press.
- Iskandar, A. Muhaimin. (2007). *Gus Dur, Islam dan Kebangkitan Indonesia*. Yogyakarta: KLIK.R
- Jatmika, Sidik. (2001). *Gerakan Zionis Berwajah Melayu*. Yogyakarta: Wihdah Press
- Mas'ood, Mohtar. (1989). *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.
- Suhartono. (2001). *Hubungan Indonesia-Timur Tengah Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid*. Dalam S. J. DPR-RI, *Analisa Kebijakan Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2000)*. Jakarta: SEKRETARIAT JENDERAL DPR-RI.
- Sukma, R. (2003). *Islam In Indonesian Foreign Policy*. London: Routledge Curzon.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
- Mukthi, M. F. (n.d.). *Sukarno dan Palestina*. Retrieved November 4, 2015, from [www.historia.id](http://historia.id): <http://historia.id/modern/sukarno-dan-palestina>
- Rubenstein, C. (2005, Maret 1). *Indonesia and Israel: A Relationship In Waiting*. Retrieved November 4, 2015, from [www.jcpa.org](http://jcpa.org): <http://jcpa.org/article/indonesia-and-israel-a-relationship-in-waiting/>
- Sulaeman, D. Y. (2014, Juli 11). *Palestina Adalah Kita*. Retrieved Juni 30, 2015, from dinasulaeman.wordpress.com: <https://dinasulaeman.wordpress.com/2014/07/11/palestina-adalah-kita/>
- Sumandoyo, A. (2015, September 21). *Jejak Mesra Hubungan Jakarta-Tel Aviv*. Retrieved November 4, 2015, from www.merdeka.com: <http://www.merdeka.com/khas/jejak-mesra-hubungan-jakarta-tel-aviv-perdagangan-indonesia-israel.html>